

**REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK PERIODE
2001-2010 DI VIETNAM STUDI PADA NATIONAL
ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION DI
HANOI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**



Oleh:

RAMDONI

07101001010

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2017

**REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK PERIODE
2001-2010 DI VIETNAM STUDI PADA NATIONAL
ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION DI
HANOI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**

**Oleh:
RAMDONI
07101001010**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Juli 2017

Pembimbing I

**Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS. MM
NIP. 19581119 198503 1 003**

Pembimbing II

**Dr. Andy Alfatih, MPA
NIP. 19601224 199001 1 001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK PERIODE
2001-2010 DI VIETNAM STUDI PADA NATIONAL
ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION DI
HANOI**

SKRIPSI

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal Juli 2017
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

TIM PENGUJI SKRIPSI

Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS. MM
Ketua

Dr. Andy Alfatih, MPA
Anggota

Dr. Andries Lionardo, S.IP.,MSI
Anggota

Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
Anggota

**Indralaya, 31 Juli 2017
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan**

Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 19631106 199003 1 001

MOTTO

Aku Yakin Usaha Sampai

(Ramdoni Bin H. Hanafi)

**Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan
Penyayang, Skripsi ini Kupersembahkan kepada :**

- 1. Kedua Orang tua ku di Desa Gunung Raja,
H. Hanafi Bin Bamat dan Rohayanti Binti
Kamarudin yang selalu mendo'akan dan
menitipkan harapan serta cita-cita agar
kelak anaknya menjadi pemimpin dan
berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara.**
- 2. Adik-adikku Sapri Dinata, Tri Hartini
Ningsi, Fabio Albanna**
- 3. Kekasihku Delta Yuliska Wulandari, S.H**
- 4. HMI Cabang Palembang**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya serta kesehatan jasmani dan rohani yang dilimpahkan kepada penulis sehingga kehendak-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memperantarai ilmu Allah sehingga sampai pada peradaban saat ini.

Skripsi ini berjudul “Reformasi Administrasi Publik Di Vietnam Studi Pada National Academy of Public Administration Di Hanoi “. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Bapak H. Hanafi dan Emak Rohayanti.

Sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini telah banyak melibatkan berbagai pihak yang sangat berarti bagi penyelesaian skripsi ini, untuk itulah dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya yang telah memimpin Universitas Sriwijaya dan menginspirasi penulis selama belajar di Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memimpin jalannya perkuliahan di FISIP Unsri.
3. Bapak Dr. Raniasa Putra, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Sriwijaya yang telah mengarahkan dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Slamet Widodo M.S.,M.M. Selaku Pembimbing I Dan Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA selaku Pembimbing II atas waktu bimbingan, arahan, ilmu dan pemberian solusinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si. dan Dr. Raniasa Putra, S.IP.,M.Si yang telah bersedia menjadi penguji dari penelitian ini serta memberikan ilmunya selama berkuliah di FISIP Unsri.
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staff administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah berperan bagi penulis dalam belajar baik didalam maupun diluar kelas.

7. Saudara-saudaraku Sapri Dinata, Tri Hartini Ningsi, Fabio Albanna yang selalu menyemangatiku dalam menulis ini.
8. Kekasihku Delta Yuliska Wulandari, S.H
9. Teman-teman seperjuangan di FISIP Angkatan 2010.
10. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palembang

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warrohmatullohi Wabarakatuh.

Indralaya, Juli 2017

Penulis

ABSTRAK

Reformasi Administrasi Publik di Negara Vietnam periode pertama tahun 2001 sampai dengan 2010. Reformasi Administrasi Public ini bertujuan untuk memperbaiki sistem administrasi dan pelayanan publik di Negara Vietnam khususnya di kota Hanoi, untuk itu pemerintah Vietnam bersama National Academy of Public Administration (NAPA) untuk mewujudkan tujuan tersebut. Adapun masalah dalam pelaksanaan Reformasi Administrasi publik di Negara Vietnam periode pertama tahun 2001 sampai dengan 2010 yaitu struktur pemerintahan yang sentralistik dan budaya organisasi yang sulit diperbaiki. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Reformasi Administrasi public dari Gerald E. Caiden. Hasil penelitian dari Reformasi Administrasi Publik di Negara Vietnam periode pertama tahun 2001 sampai dengan 2010 menunjukkan adanya perbaikan dan pelaksanaannya terarah dan sesuai prosedur, dimana Reformasi Administrasi Publik di Vietnam berhasil membuat perbaikan struktur oragnisasi Pemerintahan di Vietnam dan penyederhanaan prosedur melalui pelayanan *One Stop Shop* kepada masyarakat Vietnam khususnya kota Hanoi. Selain itu Reformasi Administrasi Publik di Negara Vietnam akan terus berkelanjutan sebagai bentuk dari komitmen Pemerintah terhadap perbaikkan sistem administrasi publik di Negara Vietnam.

Kata Kunci : Reformasi Administrasi Publik, Struktur Organisasi , One Stop Shop

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.Dr.H. Slamet Widodo,MS.MM
NIP. 19581119 198503 1 003

Dr. Andy Alfatih, MPA
NIP. 196012241990011001

Inderalaya, Juli 2017

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya

Dr. Raniasa Putra, S. IP., M.Si

NIP. 197805122002121003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Dasar Teori.....	15
B. Reformasi Administrasi Publik.....	15
C. Teori Reformasi Administrasi Publik.....	17
D. Tujuan Reformasi Administrasi Publik.....	24
E. Reformasi Administrasi Publik dalam Model Birokrasi... ..	26
F. Teori Reformasi Yang Digunakan Dalam Penelitian.....	28

G. Kerangka Teori.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	34
1. Desain Penelitian	34
2. Definisi Konsep	34
3. Fokus Penelitian	35
4. Unit Analisis	37
5. Informan Penelitian	37
6. Data dan Sumber Data	38
7. Teknik Pengumpulan Data	38
8. Teknik Validasi Data.....	40
9. Teknik Analisis Data	42
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	45
A. Profil Republik Sosialis Vietnam	45
B. Sejarah Vietnam	45
C. Pemerintah dan Politik	46
D. Geografi dan Iklim	47
E. Kependudukan	48
F. Profil National Academy of Public Administration.....	54
BAB V PEMBAHASAN	60
A. Struktur Organisasi (Organizational Structure)	60
1. Spesialisasi Kerja (Working Specialization)	60
2. Departemenisasi (Departmentization)	62
3. Rentang Kendali (Control Scale)	64

4. Sentralisasi dan Formalisasi (Centralization and Formalization)	66
B. Prosedur Organisasi (Organizational Procedure)	68
1. Proses Komunikasi (Communication Procces).....	68
2. Pengambilan Keputusan (Decision Making).....	69
3. Sosialisasi (Socialization).....	71
4. Karir (Career).....	72
C. Strategi Organisasi (Organizational Strategy).....	75
1. Komitmen Pemimpin Politik (Commitment of Political Leaders).....	75
2. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik (Socio-Economic and Political Enviroment)	77
D. Budaya Organisasi (Organizational Structure).....	80
1. Nilai dan Norma (Values and Norm).....	80
2. Iklim Organisasi (Organizational Climate).....	82
3. Komitmen Personalia (Personnel Commitmen).....	85
BAB VI PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Struktur Pemerintah Vietnam Sepanjang 1945-2011	7
Tabel 2	Perubahan Struktur Pemerintah dari Tahun 1992 Sampai Sekarang	9
Tabel 3	Matriks Teori Reformasi Administrasi.....	23
Tabel 4	Teori Reformasi Administrasi Gerald E Caiden.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Governance Effectiveness Indexes of seven Asian Economies 1996-2012..5
Gambar 2	Efficiency of Bureaucracy 2012, Scores Asian Countries.....5
Gambar 3	Peta Wilayah Vietnam.....53
Gambar 4	Pelayanan One Stop Shop Di Hanoi Vietnam63
Gambar 5	Komunikasi E-Goverment Di Vietnam68
Gambar 6	Grafik Perrbandingan E-Decision Making Vietnam dengan Negara Asia Tenggara70
Gambar 7	Pelayanan Publik Di National Academy of Public Administration Di Hanoi72
Gambar 8	Presiden Vietnam Dalam Rapat Tentang Reformasi Administrasi Publik di Vietnam76
Gambar 9	Kondisi Ekonomi dan Sosial Masyarakat Vietnam.....78
Gambar 10	Suasana Kantor One Stop Shop Di Hanoi Vietnam80
Gambar 11	Indeks E-Goverment Vietnam dan Negara Asia Tenggara.....84

DAFTAR SINGKATAN

MP PAR	: Master Program Public Administration Reform
NAPA	: National Academy Of Public Administration
PAR	: Public Administration Reform
GOV	: Government Of Vietnam
CPV	: Communist Party of Vietnam
OSS	: One Stop Shop
TRV	; Tentara Rakyat Vietnam
NIP	: Nomor Induk Pegawai
PNS	: Pegawai Negeri Sipil

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 5 : Kartu Perbaikan Seminar Proposal

Lampiran 6 :

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Vietnam adalah salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara dalam melakukan pembangunan, bisnis ini terus dilakukan dengan memperbaiki sistem administrasi publik yaitu Reformasi administrasi publik. Reformasi administrasi publik di Vietnam memiliki pengaruh signifikan dan penting dalam mencapai tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reformasi administrasi publik di Vietnam dirangkum dalam paket kebijakan yang disebut Program Master Reformasi Administrasi Publik (MP PAR) yang dimulai pada tahun 2001.

Selama periode perencanaan pasca terpusat, pengembangan administrasi publik Vietnam telah berlangsung di bawah kebijakan program reformasi administrasi publik yang pertama kali disahkan oleh Pleno ke-8 Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (VII Congress) pada bulan Januari 1995. Pada tahun 2001, Perdana Menteri menyetujui kerangka kerja nasional utama, Program Master Reformasi Administrasi Publik untuk Periode 2001-2010 (MP PAR). Program Master Reformasi Administrasi Publik menargetkan empat bidang utama reformasi: reformasi kelembagaan; reformasi organisasi; peningkatan kontingen kader dan pegawai negeri; dan reformasi keuangan publik. Ini menetapkan sembilan tujuan yang akan dicapai antara tahun 2001 dan 2010, dengan penekanan pada penyederhanaan aparatur administratif, profesionalisasi, akuntabilitas, transparansi, koordinasi, pengurangan kompartementalisasi dalam penyusunan dokumen hukum secara umum dan dalam pelaksanaan kebijakan secara khusus, dan pengurangan Korupsi. Pelaksanaan MP PAR dilakukan melalui tujuh aksi program nasional dalam dua tahap, dari tahun 2001 sampai 2005 dan dari tahun 2006 sampai 2010.

Untuk memperkuat pelaksanaan reformasi dari tahun 2006 sampai 2010, Resolusi 17-NQ / TW tertanggal 1 Agustus 2007 dari Plenum Kelima Komite Sentral menegaskan perlunya reformasi administrasi publik untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan negara.

Resolusi 53/2007 / NQ-CP tertanggal 7 November 2007, berdasarkan Resolusi 17, menguraikan sepuluh tugas spesifik untuk periode 2007 sampai 2010, dan juga mencakup daftar sub-tugas, agen penanggung jawab utama dan badan koordinasi, produk akhir, dan waktu penyelesaian.

Dalam melaksanakan pembangunan, Vietnam perlu melakukan reformasi menyeluruh terhadap administrasi publik untuk membangun pemerintahan yang bersih, kuat dan dekat dengan masyarakat, sementara dibutuhkan komitmen kuat untuk menerapkan tindakan antikorupsi, kolusi dan nepotisme. Partai Komunis Vietnam (CPV) dan Pemerintah Vietnam (GOV) meluncurkan program reformasi administrasi publik (PAR) pada bulan Januari 1995 dengan Resolusi Pleno VIII Komite Pusat CPV. Upaya yang dilakukan untuk merasionalisasi kerangka hukum dan peraturan administrasi publik; Untuk mereformasi mesin administrasi di semua tingkat; Dan 'merenovasi' pegawai negeri dengan fokus pada pelatihan. Komite Pengarah Nasional untuk PAR yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk di pemerintah pusat, dan sebuah Dewan Pengarah didirikan di setiap kementerian dan provinsi di negara tersebut. Pada prinsipnya, PAR terkait dengan reformasi terkait perusahaan publik, organisasi dan operasi Majelis Nasional, dan sistem hukum dan peradilan.

Dalam melaksanakan pembangunan tersebut, Vietnam perlu melakukan reformasi menyeluruh terhadap administrasi publik untuk membangun pemerintahan yang bersih, kuat dan dekat dengan masyarakat, sementara komitmen yang kuat diperlukan untuk menerapkan anti-korupsi, kolusi dan nepotisme. Partai Komunis Vietnam (CPV) dan Pemerintah Vietnam (GOV) meluncurkan program reformasi administrasi publik (PAR) pada bulan Januari 1995

dengan Komite Pusat Resolusi CPV Pleno VIII. Upaya yang dilakukan untuk merasionalisasi kerangka hukum administrasi dan peraturan publik; Melakukan reformasi mesin administrasi di semua tingkat; Dan 'merenovasi' pegawai negeri dengan fokus pada pelatihan. Komite Pengarah Nasional untuk PAR yang dipimpin oleh Perdana Menteri didirikan di pemerintah pusat, dan sebuah Komite Pengarah dibentuk di setiap kementerian dan provinsi di negara ini. Pada prinsipnya, PAR memperhatikan reformasi yang berkaitan dengan perusahaan publik, organisasi dan operasi Majelis Nasional, dan sistem hukum dan peradilan.

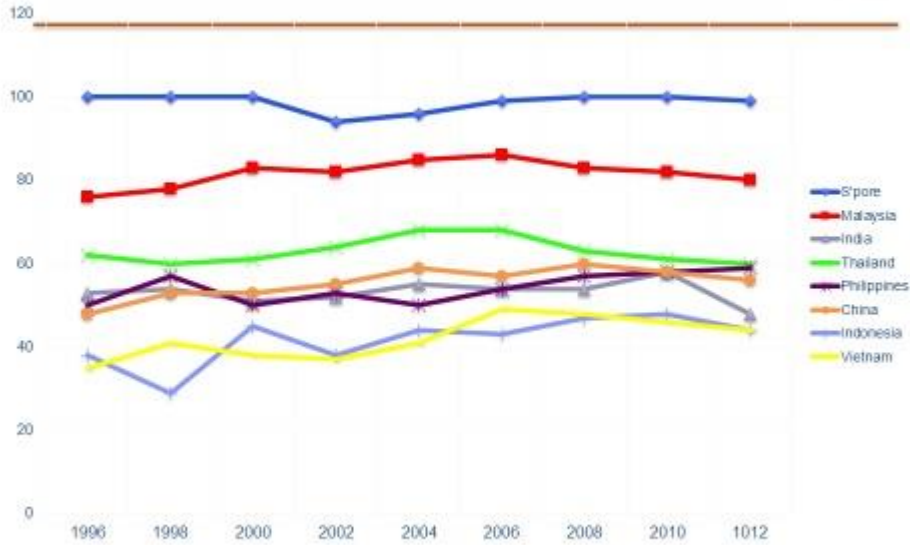
Dalam menerapkan Program Master Reformasi Administrasi Publik, Vietnam sebagai negara berkembang menghadapi berbagai masalah yang dimulai dengan, prosedur organisasi yang lamban dan rumit, struktur organisasi terpusat dan tumpang tindih, dan kapasitas dan kompetensi profesional kader dan pegawai negeri masih lemah.

Berdasarkan resolusi No. 57/2010 / QH12 tentang hasil pengawasan prosedur administrasi di beberapa bidang yang berkaitan langsung dengan warga negara dan perusahaan berdasarkan program master reformasi administrasi 2001-2010, Majelis Nasional Republik Sosialis Vietnam. Konstitusi Republik Sosialis Vietnam 1992, yang telah diubah dan ditambah dengan Resolusi No.51 / 2001 / QH10; Berdasarkan Undang-Undang Nomor 05/2003 / QH11 tentang Kegiatan Pengawasan Majelis Nasional; Setelah mempertimbangkan Laporan Tetap Standing Committee's No. 387 / BC-UBTVQH12 tanggal 18 Oktober 2010, Laporan Pemerintah No. 150 / BC-CP tanggal 18 Oktober 2010, dan pendapat para wakil Majelis Nasional, administrasi reformasi prosedur tetap lamban, gagal memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh program master reformasi administrasi publik. Di beberapa bidang, prosedur administrasi tetap bermasalah, tumpang tindih dan tidak masuk akal, menyebabkan kesulitan bagi masyarakat dan pelaku bisnis. Masih agak umum bahwa kader dan pegawai negeri lamban, otoriter, melecehkan dan negatif dalam melakukan pekerjaan mereka; Disiplin administrasi dan hukuman pelanggaran; Prosedur administrasi masih

membebani orang dan bisnis banyak uang dan waktu serta menunda atau menghilangkan peluang investasi dan bisnis mereka dan mengurangi daya saing. Penerapan mekanisme one-stop-shop dan antar agen one-stop shop untuk mereformasi prosedur administrasi di beberapa bidang tetap membingungkan, formalistik dan irasional. Koordinasi antar level dan sektor terbatas dalam sejumlah kasus; Kantor kerja, yayasan fisik dan peralatan di beberapa daerah gagal memenuhi persyaratan tugas yang ditugaskan. Kualitas dokumen legal yang diberlakukan pada prosedur administrasi tidak tinggi, dengan beberapa peraturan yang tidak praktis dan ambigu. Modernisasi dan penerapan teknologi informasi terhadap penyelesaian prosedur administrasi masih banyak melihat keterbatasan dan kelemahan; Informasi, propaganda dan mobilisasi untuk mendukung program master administrasi administrasi publik belum ekstensif dan intensif.

Gambar

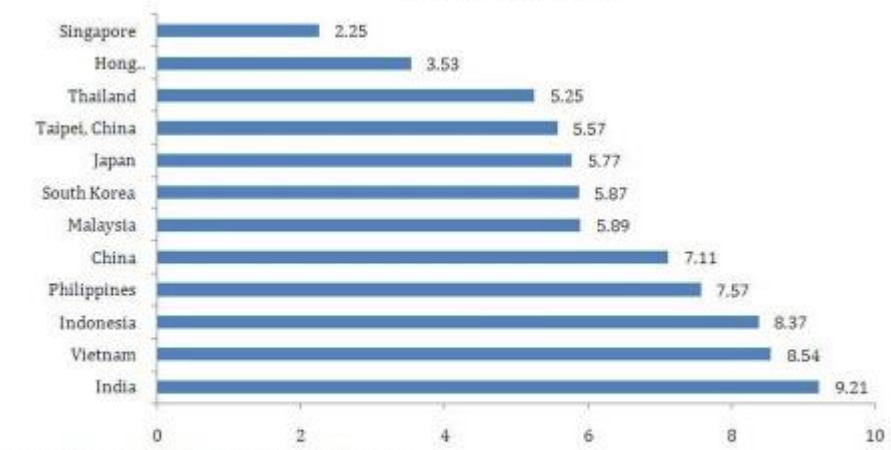
**GOVERNANCE EFFECTIVENESS INDEXES
OF SEVEN ASIAN ECONOMIES 1996-2012**



Source: World Bank, 2013

Gambar 2

Efficiency of Bureaucracy 2012, Scores ASIAN Countries



Source: PERC Ltd, Jan 2012; Note: 1-Best, 10-Worst

Struktur pemerintah pusat di Vietnam, mengingat sejarah organisasi negara yang relatif panjang, telah digemukakan dan membungkok selama bertahun-tahun. Gambar tersebut

memberikan informasi tentang jumlah kementerian dan lembaga pemerintah sepanjang tahun 1945-2011 (17 masa jabatan pemerintah). Jumlah kementerian memuncak selama masa jabatan 1976-1992. Dalam hal otoritas provinsi, jumlah departemen di sana berkurang dari antara 35-40 di tahun 1986, menjadi sekitar 20-25 setelah tahun 2001; Daerah pedesaan dari 20-25 sampai 10-151. Dari akhir tahun 1990an, struktur pemerintahan selanjutnya dibentuk kembali ketika peran pembuatan kebijakan pemerintah dibedakan dari tugas sehari-hari penyediaan layanan administrasi dan pelayanan publik.² Ukuran pemerintahan, seperti yang terlihat melalui jumlah kementerian, Berkurang lebih jauh dalam latihan di tahun 2007, turun menjadi 22. Niat di balik pengurangan ukuran pemerintah sejak tahun 1992 adalah mengurangi lingkup pengawasan kementerian atas perusahaan dan entitas yang menyediakan layanan publik secara langsung, sehingga kementerian dan lembaga pemerintah dapat berkonsentrasi pada pembuatan kebijakan. Dengan demikian, perusahaan atau badan yang memiliki fungsi untuk memberikan layanan secara langsung kepada masyarakat didorong keluar dari kendali langsung kementerian, atau direorganisasi sehingga tidak berada di bawah kendali menteri dan / atau kementerian.

Tabel 1 Struktur Pemerintah Vietnam

Periode Pemerintah	Jumlah kementerian	Jumlah instansi tingkat menteri	Jumlah
Pemerintah sementara pada tanggal 2 September 1945	12	0	12
Pemerintahan koalisi sementara (didirikan pada tanggal 1 Januari 1946)	13	0	13
Pemerintah koalisi perlawanan (didirikan pada tanggal 2 Maret 1946)	10	0	10
Pemerintahan baru (menggantikan pemerintah koalisi perlawanan, yang diajukan oleh Presiden Ho Chi Minh dan diadopsi pada sesi kedua Majelis Nasional ke-1 pada tanggal 3 November 1946, dan terus ditambah sampai tahun 1955)	13	1	14
Pemerintah yang Diperbesar (diadopsi pada sesi ke-5 Majelis Nasional ke-1 pada tanggal 20 September 1955 mengikuti usulan Presiden Ho Chi Minh, dan dilanjutkan dengan suplemen sampai sesi ke-10 Majelis Nasional ke-1 pada tanggal 27 Mei 1959)	18	2	20
Pemerintah di bawah masa jabatan Majelis Nasional II (1960-1964)	18	7	25
Pemerintah di bawah masa jabatan	23	10	33

Majelis Nasional III (1964-1971)			
Pemerintah di bawah masa jabatan Majelis Nasional V (1975-1976)	19	9	28
Pemerintah di bawah masa jabatan Majelis Nasional VI (1976-1981)	28	9	37
Pemerintah (dewan menteri) di bawah masa jabatan Majelis Nasional VII (1981-1987)	29	8	37
Pemerintah (dewan menteri) di bawah masa jabatan Majelis Tinggi VIII (1987- 1992)	25	12	37
Pemerintah di bawah masa jabatan Majelis Nasional IX (1992-1997)	21	7	28
Pemerintah di bawah masa jabatan Majelis Nasional XII (1997-2002)	17	8	25
Pemerintah di bawah masa jabatan Majelis Nasional XI (2002-2007)	20	6	26
Pemerintah di bawah masa jabatan Majelis Nasional XII (2007-2011)	18	4	22

Source: The Vietnamese Government 1945-2003, Facts and Figures, VNA Publishing House 2004; Resolution No. 01 of Parliament on 31 July 2007 about Organization Structure of the Government and Number of Vice Prime Ministers of the Government Term XII.

Vietnam telah mengubah struktur dan ukuran pemerintahan sehingga fungsinya dirasionalisasi dan kementerian telah menjadi lingkungan *multi-tasking*.

Tabel 2 Beberapa perubahan penting dalam struktur pemerintahan, dari tahun 1992 sampai sekarang

Periode 1992-1997		Periode 1997-2002
+ Kementerian Energi	Kementrian Industri	Kementrian Industri
+Kementerian Industri Ringan		
+Kementerian Industri Berat		
+Kementerian Pertanian dan Industri Pangan	Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan	Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan
+Kementerian Kehutanan		
+Kementerian Sumber Daya Air		
Periode 1997-2002		Periode 2002- 2007
+ Departemen Umum untuk Administrasi Pertanahan		Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
+ Departemen Umum untuk Hidrologi dan Meteorologi		
+ Badan Lingkungan Hidup Viet Nam (di bawah Kementerian Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Lingkungan)		
+ Departemen Geologi dan pertambangan (di bawah Kementerian Perindustrian)		
+ Unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan		

sumber daya air Departemen Pekerjaan Hidrolik dan Pengelolaan Sumber Daya Air (di bawah Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan)	
+ Komite Organisasi Personalialia + National Academy of Public Administration	Kementerian dalam negeri
Departemen Umum untuk Pos	Kementerian Pos dan Komunikasi
+ Komite Kependudukan dan Keluarga Berencana + Komite Perlindungan Anak	Komite untuk Kependudukan, Keluarga dan Anak-anak
+ Kementerian Keuangan + Jenderal Departemen Bea Cukai + Komite Harga Pemerintah + Kementerian Perhubungan dan Transportasi + Departemen Penerbangan Sipil Viet Nam	Kementerian Keuangan Kementerian Perhubungan dan Transportasi
Periode 2002-2007	Periode 2007-2011
+ Kementerian Kebudayaan dan Informasi + Departemen Umum untuk Pariwisata + Komite Olahraga + Unit yang bertanggung jawab atas keluarga (Di bawah Komite untuk Kependudukan, Keluarga dan Anak-anak)	Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata
+ Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan + Kementerian Perikanan	Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan
+ Kementrian Perindustrian	Kementrian Perindustrian dan

+ Kementerian Perdagangan	Perdagangan
+ Kementerian Kesehatan + Unit yang bertanggung jawab atas populasi (Di bawah Komite untuk Kependudukan, Keluarga dan Anak-anak)	Kementrian Kesehatan
+ Kementerian Pos dan Komunikasi + Unit yang bertanggung jawab atas informasi (di bawah Kementerian Kebudayaan dan Informasi)	Kementerian Informasi dan Komunikasi
Kementerian Tenaga Kerja, Cacat dan Urusan Sosial + Unit yang bertanggung jawab atas anak-anak (Di bawah Komite untuk Kependudukan, Keluarga dan Anak-anak)	Kementrian Tenaga Kerja, Cacat dan Urusan Sosial
+ Departemen Dalam Negeri + Komite Pemerintah untuk Urusan Penting + Komite Pemerintah untuk Agama + Komite Sentral untuk Emulasi dan Pemberian	Kementrian Dalam Negeri
+ Kementerian Perencanaan dan Investasi + Kantor Umum Statistik	Kementerian Perencanaan dan Investasi

Source: The Vietnamese Government 1945-2003, Facts and Figures, VNA Publishing House 2004; Resolution No. 01 of Parliament on 31 July 2007 about Organization Structure of the Government and Number of Vice Prime Ministers of the Government Term XII; Resolution No. 2/2002/ QH11 dated 5 August 2002; <http://www.monre.gov.vn/monreNet/Default.aspx?tabid=201>; Decision No. 113/2002/QD-TTg dated 4 September 2002; Decision No. 121/2002/QD-TTg dated 19 September 2002; Decision No. 122/2002/QD-TTg dated 19 September 2002; Decision No. 123/2002/QD-TTg dated 19 September 2002; Resolution No. 1/2007/QH12 dated 31 July 2007; Decree No. 1/2007/ND-CP dated 4 January 2007; Decree No. 8/2007/ND-CP dated 8 August 2007; Decree No. 9/2007/ND-CP dated 8 August 2007; Decision No. 1000/2007/QD-TTg dated 8 August 2007; Decision No. 1001/2007/QD-TTg dated 8 August 2007

Secara umum, keefektifan atau kekurangannya dari pihak pemerintah Vietnam dapat dikaitkan dengan beberapa kelemahan logis dan struktural yang penting yang merupakan warisan sejarah pemikiran lama era sebelumnya. Pada awalnya, karena warisan perencanaan

pusat, pemerintah sementara telah menyadari perlunya memperkuat peran pasar, tidak dapat sepenuhnya melepaskan warisan itu dengan cepat. Hal ini dapat dijelaskan dengan adanya kelompok kepentingan; Namun realitas berbagai pusat kekuasaan terletak di jantung keefektifan kelompok kepentingan dan dengan demikian memperlambat reformasi. Badan usaha milik negara misalnya lebih memilih untuk tetap tinggal di negara karena akses mudah ke dana negara lebih disukai daripada disiplin pasar, Dan tidak sulit bagi perusahaan untuk menjajakan pengaruh mereka atau untuk menyatakan ketertarikan mereka pada retorika peran negara dalam ekonomi pasar sosialis. Kementerian yang memiliki kendali atas perusahaan terbesar dan paling penting (melalui pengangkatan personil), bahkan jika mereka korporatized memiliki pengaruh yang luar biasa dan kartu panggil besar dalam politik.

Kedua, situasi pusat kekuatan ganda di Viet Nam dilengkapi dengan budaya birokrasi penghindaran kesalahan sementara pada saat yang sama mengambil risiko bila ada keuntungan material yang signifikan yang dapat direalisasikan. Mengizinkan penerapan untuk didelegasikan ke tingkat otoritas yang lebih rendah, dalam budaya ini, berarti bahwa pemerintah daerah mengambil risiko bila ada kepentingan yang harus diamankan dan sangat sedikit bahaya tertangkap jika melampaui batas wewenang mereka, dan lulus Pada tingkat atas ke tingkat atas ketika risiko signifikan adalah keputusan yang harus dilakukan secara legal, mereka memiliki wewenang yang cukup untuk membuatnya. Kementerian pemerintah dan Perdana Menteri khususnya sering menemukan arahan mereka untuk memperbaiki tindakan *ultra vires* diabaikan, dan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memutuskan hal-hal yang seharusnya diputuskan oleh tingkat yang lebih rendah. Tidak diragukan lagi, yang terakhir ditambah dengan kurangnya kepercayaan akan itikad baik dari pemerintah daerah. Ketiga, kesalahan penempatan tanggung jawab individu telah ditingkatkan dengan adanya penggabungan tanggung jawab individu dengan tanggung jawab kolektif. Seringkali sulit untuk menghilangkan seseorang dari posisi pengambilan keputusan setelah keputusan

salah atau mahal telah dilakukan. Alasannya adalah bahwa proses pengambilan keputusan seringkali melibatkan terlalu banyak pemangku kepentingan yang diminta memberi masukan dan diberi terlalu banyak pendapat; Keputusan sering keluar, terutama dalam gaya dokumen resmi yang kontradiktif karena mereka sering harus merefleksikan setiap opini yang sering saling bertentangan. Ketika tanggung jawab dilacak, sering kali mengarah ke sebuah kelompok yang tidak akan bertanggung jawab, dan pemimpin kementerian dan agen sering kali tidak memiliki hak untuk memberhentikan orang-orang yang tidak kompeten kecuali jika ada kesalahan yang jelas di mata hukum yang telah dilakukan. .

Berdasarkan latar belakang di atas, tesis ini menganalisis Program Magister Administrasi Publik (PAR) periode 2001-2010 di Vietnam Studi pada National Academy of Public Administration (NAPA) Hanoi.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Program Master Reformasi Administrasi Publik Periode 2001-2010 di Vietnam (Studi Pada National Academy of Public Administration) Hanoi?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana Program Master Reformasi Administrasi Publik Periode 2001-2010 di Vietnam (Studi Pada National Academy of Public Administration) Hanoi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperdalam kajian Program Master Reformasi Administrasi Publik di National Academy of Public Administration, Hanoi dan menyumbangkan gagasan untuk pengembangan administrasi publik. Hasilnya juga diharapkan bisa memberikan referensi untuk penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh objek yang sama.

2. Manfaat praktis

A. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu Program Master Reformasi Administrasi Publik di Vietnam Periode 2001-2010 Studi Pada National Academy of Public Administration (NAPA) Hanoi.

B. Untuk memberikan sarana informasi tambahan mengenai hal-hal yang terkait dengan Program Master Reformasi Administrasi Publik di Vietnam Periode 2001-2010 di National Academy of Public Administration (NAPA) Hanoi.

